

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEKERASAN
PEREMPUAN DI KOTA PALU**

DELBI ADE KUSUMA / D 101 09 040

ABSTRAK

Tindak kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terus terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Faktanya, berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi tersebut sering terjadi di berbagai aspek kehidupan sosial disetiap daerah. Tujuan penelitian yang terdapat didalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan Upaya pencegahan serta penanggulangan terjadinya tindak kekerasan pada perempuan yang berada di kota palu. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel yang terdapat di Kota Palu Sulawesi Tengah, mengambil bahan penunjang dalam penulisan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Sulawesi Tengah, dengan tujuan untuk memperoleh semua data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuiseioner dan dilengkapi beberapa dokumen penting lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di kota palu antara lain : 1. Faktor Intern yang terdiri dari umur, jenis kelamin, pendidikan dan agama, 2. Faktor Ekstern yaitu, lingkungan keluarga, ekonomi dan lingkungan sosial. Selain itu, keadaan perempuan yang tempat tinggalnya berada di pinggiran kota juga menjadikan satu faktor sehingga mengakibatkan rendahnya pemahaman dan daya serap atas informasi yang bermanfaat untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan. Selain itu, dari hasil penelitian tentang upaya pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu secara Preventif, adalah upaya yang bersifat sebagai tindakan awal untuk mencegah terjadinya kekerasan dan yang secara Represif, merupakan satu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga ataupun diluar lingkungan keluarga.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

A. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan saat ini terus meningkat seiring dengan perkembangan yang disusul dengan kemajuan disetiap negara. Sementara bentuk kekerasan yang tampak dipermukaan sangat kecil, karena secara faktual kekerasan terhadap perempuan sangat luas dan dapat dijumpai dalam berbagai konteks kehidupan manusia.

Pelaksanaan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan pada perempuan di kota palu sangat kecil dibandingkan dengan angka kekerasan yang terjadi. Perempuan dalam memperjuangkan hak akan keadilan terkendala oleh faktor Eksternal dan Internal, dimana secara eksternal keterbelakangan peran perempuan disebabkan oleh kultur (masyarakat/budaya), sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang masih menempatkan perempuan sebagai individu yang tidak mandiri dalam mengambil keputusan. Selain

itu, secara internal perempuan khususnya diwilayah pinggiran kota palu sangat terkendala oleh pengaruh kemiskinan.

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan rendah pula kemampuan untuk menyerap informasi dengan baik, ini sangat berpengaruh pada kemampuan memilah benar atau tidaknya informasi yang datang sehingga menimbulkan kerentanan dimasyarakat yang akibatnya, mereka sangat mudah menerima informasi yang salah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sektor perekonomian dan pendidikan masyarakat seperti itu, menyebabkan pula hambatan psikologis pada diri kaum miskin dan perempuan. Mereka rentan terhadap pelanggaran kekerasan dan ketidak pemenuhan hak. Rasa minder (inferior), rasa takut, serta budaya feodalistik (zaman kerajaan) menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan rasa keadilan atas berbagai kekerasan yang dialaminya.

Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2008 yang dirilis oleh Komnas Perempuan, menunjukan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP). Peningkatan ini sangat signifikan, yakni mencapai **54.425** kasus. Jumlah tersebut naik dua kali lipat lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka kekerasan pada tahun 2007 yang berjumlah **25.522** kasus. Bahkan kenaikan ini mencapai puncaknya pada tahun 2005, yakni sebesar 50% yang dipicu dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Jumlah ini menunjukan betapa perempuan sebagai korban kekerasan sangat menggantungkan rasa keadilannya pada hukum dan peradilan.¹

Data-data tersebut belum dapat mewakili keseluruhan fakta kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana dapat kita ketahui bersama, setiap kekerasan tersebut banyak terjadi dalam lingkungan keluarga (lingkungan

rumah tangga), dan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan adalah lemahnya kedudukan perempuan sebagai istri.

Perempuan sebagai korban kekerasan yang merasa enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya ke institusi berwenang. banyak alasan seperti adanya anggapan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kasus yang pribadi, aib untuk diungkapkan serta menghindari pandangan ataupun cerita miring masyarakat terhadap dirinya dan keluarganya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 menjelaskan :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang atau perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.²

Keberadaan pasal ini jelas bahwa apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkungan keluarga secara melawan hukum, harus mendapat sangsi yang tegas bahkan diharuskan melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang.

Jenis kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terus meningkat, namun kenyataannya kekerasan tersebut tidak dapat diproses secara hukum yang sebenarnya, karena ada hambatan dari sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum (peraturan/kebijakan), struktur hukum (institusi peradilan dan pelaksanaan hukum), serta kultur hukum (masyarakat/budaya hukum) yang sama sekali tidak mengutamakan kepentingan perempuan korban kekerasan.

Kejahatan yang berbentuk dalam segala tindak kekerasan adalah satu perbuatan yang menyimpang, perilaku yang gagal, melanggar ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan selalu

¹Komnas Perempuan, *Penanganan Kasus Terhadap Perempuan*, Jakarta, Lukisan Karya Jeihan, 1984. Hlm. 7

²Tapi Omas Ihromi, *Penjelasan tentang UU-PKDRT*, Hlm. 389

merugikan banyak orang untuk itu, perlu celaan atau sanksi terhadap pelakunya.

Pengertian secara sosial dari suatu kejahatan yang terjadi menurut *encyclopedia* serta para pemimpin revolusi Perancis, sering menyiarkan dan berpendapat bahwa adanya hubungan antara kejahatan dan keadaan masyarakat.³

Pembagian kriminologi dilihat dari sosiologi kriminal terjadinya satu kejahatan adalah suatu gejala yang timbul dan berkembang dari lingkungan masyarakat. Dari uraian tersebut sesungguhnya hanya ingin mengetahui dan menjawab sampai dimana letak sebab musabab kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya yang dapat menentukan bahwa perbuatan itu jahat atau tidak adalah Hukum. Olehnya didalam mencari sebab musabab tindak kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan harus dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Jhon Rawis mengatakan bahwa kekerasan tidak mungkin menjadi *Mode Of Addre* (cara pengungkapan) dalam masyarakat, artinya kekerasan tidak mungkin pula harus menjadi bentuk peringatan kritis terhadap masyarakat.⁴ Melihat dan mencari beberapa faktor penyebab yang ada, tidak seharusnya setiap bentuk kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat merupakan bentuk peringatan yang kritis dan memaksa bahkan mengucilkan masyarakat lainnya.

Gerakan-gerakan politik, hingga pengesahan produk hukum internasional kedalam produk hukum nasional dilakukan sebagai bentuk upaya pemenuhan hak dan keadilan bagi setiap manusia. Pemerintah indonesia khususnya, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Kota Palu, perlu mengambil satu tindakan tegas dan seperlunya untuk mengurangi dampak negatif yang akan terjadi dari kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat yang umumnya

adalah perempuan di Kota Palu dalam bidang pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.

Bersama beragam suku, adat/budaya dan pola hidup masyarakat indonesia saat ini dapat menjadi titik berat untuk mengesahkan setia perancangan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur jalannya kehidupan masyarakat, haruslah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri dan untuk pembangunan hukum nasional.

*“Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersedikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat”.*⁵

Kekerasan yang dialami perempuan sebenarnya merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender yang dipahami dengan menguraikan peran laki-laki maupun perempuan yang kemudian dikonstruksikan kedalam gender, pada tingkat selanjutnya banyak melahirkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana laki-laki secara sadar maupun tidak sadar bertindak sebagai pelaku.

Jangkauan perlindungan hukum bagi kekerasan perempuan belum meliputi semua hak-hak yang berhubungan dengan gender, seks, dan seksualitas. Jika dilihat dari segi hukum yang sebenarnya dapat memberikan perlindungan, dimana perlindungan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas yang tergolong dalam bentuknya seperti kekerasan seksual, pelecehan dan pemerkosaan.⁶

Wacana tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang kemudian menjadi sebuah kegiatan untuk menumbuhkan kembangkan berbagai program serta

³Wahju, Muljono. *Teori Krimonologi*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2012. Hlm 25

⁴Pendapat Jhon Rawis dalam Bukunya Widauti, Agnes. *Hukum Berkeadilan Gender*, Jakarta : KOMPAS, 2005.

⁵C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm. 40-41

⁶Ruth. Indiyah, Rahayu. *RUU Ketenagakerjaan Yang Menghina Perempuan*, op.cit. Hlm. 82

pemberdayaan perempuan saat ini cukup banyak. Melalui sosialisasi serta berbagai pelatihan teruslah digalang, bukan hanya untuk meningkatkan kepekaan gender dalam lingkungan peradilan melainkan kepekaan berkewarganegaraan (civic), demi mewujudkan masyarakat yang adil dan setara (gender).⁷

Pemerintah Kota Palu yang mempunyai wewenang sebagai pengatur jalannya kehidupan masyarakat kota palu, teruslah memperhatikan keadaan serta pola hidup masyarakat untuk dijadikan acuan dalam membentuk sebuah pengesahan produk hukum dan undang-undang serta peraturan lainnya, sehingga dalam penerapan yang nyata masyarakat dapat menerima dan merasakan keadilan hukum tanpa perbedaan dan diskriminasi antara satu dengan yang lainnya.

Segala bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan harus selalu mendapat perlindungan hukum, pelayanan, penanganan, dan upaya pemulihan kepada korban agar supaya perbuatan kekerasan tersebut berkurang dan tidak terjadi lagi dalam lingkungan kita.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu ?
2. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Palu ?

II. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Palu

Persoalan kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dalam lingkungan kehidupan kita. Parahnya tidak semua kasus kekerasan tersebut dapat muncul kepermukaan dan tertangani dengan baik, tidak jarang para perempuan sebagai korban hanya berlapang dada menerima dengan segala resiko.

Penyebab timbulnya kejahatan sangatlah kompleks. Banyak faktor yang saling mempengaruhi, Sutherland mengatakan bahwa:

“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Faktor-faktor tersebut untuk selanjutnya tidak dapat disusun menurut satu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian, atau dengan perkataan lain untuk menerangkan atau menjelaskan kelakuan kriminal yang ada teori ilmiahnya”.⁸

Secara umum dapat disimpulkan faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan atau kekerasan dibedakan menjadi dua bagian, yakni :

• Faktor Intern

Dalam faktor ini, menjelaskan bahwa perbuatan kejahatan yang dilakukan merupakan tindak kejahatan yang secara khusus muncul dari dalam diri (individu) serta dapat dihubungkan dengan beberapa tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku. Faktor yang ada tersebut dapat berupa umum dan khusus. Faktor yang bersifat umum, misalnya :

- Faktor Umur

Semua manusia pasti akan mengalami perubahan secara jasmani maupun rohani. bertambahnya umur misalnya, akan membuat satu perubahan yang sangat besar pada diri manusia yang berakibat menimbulkan salah satu tindak kejahatan, hanya saja dalam perilaku kejahatan tersebut ada perbedaan sesuai dengan perkembangan alam dan pola berfikir serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar lingkungan kehidupan masing-masing.

- Jenis Kelamin

Perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki juga mempunyai hubungan dengan perilaku kejahatan. pada dasarnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki berbeda dengan perempuan, karena tenaga atau hal lain yang menyebabkan laki-laki lebih kuat.

⁷Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Jakarta, 2001

⁸H. Hari Saherodji, *Op-Cit*, Hlm. 35.

Memukul, membunuh, dan melakukan kejahatan dalam lingkungan keluarga/rumah tangga, disini lebih banyak perempuan bahkan anaklah yang menjadi korban.

- **Pendidikan dan Agama**

Pendidikan merupakan suatu faktor yang mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkalaku individu seseorang terutama pada inteligensia atau akibat dari pemikirannya. Sementara agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang menajadi kebutuhan spiritual. Setiap norma yang terkandung didalamnya mempunyai nilai yang tinggi disetiap kehidupan. Norma tersebut merupakan norma ketuhanan yang telah digariskan oleh masing-masing agama, dan mengajarkan tindakan kebaikan yang dapat membimbing manusia kejalan yang baik dan benar. Menunjukan hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan, dengan mendalami dan mengerti akan agama berfungsi sebagai kontrol semua aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.

• **Faktor Ekstern atau Faktor Lingkungan**

Faktor ekstern atau yang disebut sebagai faktor lingkungan, merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan karena sebab yang muncul dari luar diri individu seseorang. Faktor lingkungan ini mempunyai pengaruh yang besar dan bersifat *Causal* terhadap individu yang telah melakukan kejahatan ataupun bentuk kekerasan. Adapun beberapa faktor lingkungan yang dijelaskan yaitu :

- **Lingkungan Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dari kelompok masyarakat, akan tetapi keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dan berpengaruh besar dalam kehidupan. Dalam lingkungan keluarga inilah seorang anak akan memulai proses perkembangan psikis maupun fisiknya. Lingkungan keluargalah yang menjadi obyek awal dimana seorang anak belajar dan mendapat pengalaman yang membentuk kepribadian sehingga dipandang letaknya dasar kepribadian manusia nantinya yang berpengaruh bagi semua perkembangannya.

Ruth S. Cavan mengemukakan bahwa:

1. Bahwa lingkungan keluarga adalah satu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak, olehnya lingkungan tersebut memegang peran penting sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas.
2. Lingkungan keluarga adalah lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari dan memberikan pengawasan terhadap anak-anak.
3. Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak maka, dengan langsung anak akan menerima pengaruh emosional dari lingkungannya. Kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta atau benci akan berpengaruh pada watak anak, mulai dari lingkungan keluargalah akan menentukan sifat anak dimasa yang akan datang.⁹

- **Lingkungan Ekonomi**

Manusia pada umumnya tidak pernah puas dengan segala apa yang dimilikinya. Untuk memenuhi hal tersebut manusia selalu berusaha dan merubah taraf kehidupannya menjadi lebih baik. Adanya masalah ekonomi sering kali menyurutkan langkah perempuan untuk keluar dari lingkaran kekerasan. Ketergantunganlah yang timbul sehingga membuat seorang perempuan tidak berdaya menghadapi dirinya sendiri dan perlakuan dari suaminya.

Seorang perempuan yang memberikan rasa tuntutan yang begitu besar kepada seorang suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang menjadi bentuk kewajiban dari suami. Selain itu, perbedaan pendapatan penghasilan antara suami dan istri juga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya pendapatan istri lebih besar dari suami, timbul satu

⁹Pendapat Ruth S. Cavan dalam bukunya G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. Hlm. 90

keegoisan dan merasa lemah dari seorang suami yang berdampak pada penekanan dan berujung kekerasan terhadap istri.

- Lingkungan Sosial

Manusia secara umum merupakan makhluk sosial, dan dengan demikian setiap individu akan melakukan hubungan interaksi sosial dengan individu lainnya. Dalam hal ini ketikan terjadi bentuk kekerasan diluar atau didalam lingkungan keluarga, kendala yang paling sering muncul yakni menghadapi komentar negatif dari sebagian masyarakat atau tetangga akan keadaan keluarga. Masih banyak tanggapan ketika perempuan menjadi korban kekerasan dari seorang laki-laki atau suami, perempuan atau korban tersebut dianggap sebagai istri yang kurang mampu melayani suami, kurang sabar, kurang pandai mengurus anak, dal lain sebagainya. Padahal kekerasan itu terjadi bisa saja karena keinginan seorang pelaku yang memandang rendah atau sama skali tidak menghargai perempuan sebagai istri.

B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Palu

Upaya pencegahan dan penanggulangan dalam mengurangi segala tindak kekerasan dan kejahatan lainnya yang berskala besar di Kota Palu. Bukan hanya menyangkut sistem peradilan misalnya, pihak kepolisian, kejaksaan yang berperan sebagai penyidik, dan pengadilan untuk selanjutnya dapat menentukan putusan akhir dala satu persidangan, adakalanya kita juga mengingat betapa pentingnya peranan pemerintah setempat dalam hal ini Kota Palu, serta lingkungan sosial masyarakat dalam lingkungan keluarga atau diluar lingkungan keluarga.

Bentuk upaya pencegahan bahkan penanggulangan sebagai tindak awal tentunya harus mengedepankan peranan lingkungan sosial dalam suatu masyarakat. Pihak keluragalah yang harus berperan penting dalam segala hal yang akan terjadi nantinya, karena melihat keadaan secara umum perempuan korban kekerasan enggan

melaporkan kasus yang dialaminya dalam keluarag ke pihak yang berwenang, dengan banyak alasan yang akhirnya cenderung untuk mengalah dan menerima begitu saja.

Pelanggar hukum yang melakukan tindak kekerasan saat ini, dalam melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan tentunya tidak dapat dilaksanakan secara efektif, jika tidak dihubungkan erat dengan kecenderungan sosial serta ekonomi. Terhadap peraturan serta berbagai kebijakan yang ada bukan memberikan perlindungan dan meringankan korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya, melainkan sebaliknya, untuk itu upaya pencegahan serta penanggulangan dibidang kebijakan juga menjadi soal utama. Adapula ketika semua peraturan atau kebijakan itu sudah sepenuhnya benar, para pelaksana aturan, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya keluar dari prosedur yang tertera dalam peraturan dan atau kebijakan.

Soerjono Soekanto mengemukakan tentang proses penegakan hukum, yaitu:

“Sebagai salah satu strategi dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan dan/atau kekerasan, yakni perundang-undangan, mentalitas penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat maupun kebudayaan dalam masyarakat”.¹⁰

Walter C. Reckles menambahkan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan sebelum terjadinya kekerasan dan dapat berhasil diatasi. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
4. Hukum yang berwibawah

¹⁰Pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan dan Kekerasan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 6

5. Partisipasi masyarakat dalam usaha pencegahan dan tindakan penanggulangan kekerasan.¹¹

Jika dilihat dari informasi dan akses ke beberapa layanan, persoalan yang muncul dalam Implementasi atau penerapannya, korban KDRT yang mengurus perkara pidana atau perkara yang berujung perdata lainnya dipengadilan agama atau pengadilan negeri, belum mendapat layanan dan rekomendasi untuk mendapatkan bantuan layanan terpadu. Lebih parah lagi belum ada mekanisme pemberian layanan terpadu yang mengintegrasikan pengadilan agama atau negeri dengan berbagai lembaga penyedia layanan lainnya dalam menangani kasus KDRT, banyak dalam kasus itu mengenai putusan hakim sama sekali tidak dilaksanakan dengan baik.¹²

Ada beberapa cara untuk menguraikan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, yaitu :

- **Pencegahan dan Penanggulangan Preventif**

Selain dari segi yuridisnya usaha pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan terdapa beberapa usaha untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sebab-sebab atau faktor penyebab terjadinya suatu tindak kekerasan (etiologi kriminil). Penanggulangan secara preventif adalah suatu tindakan penanggulangan kejahatan atau kekerasan dengan cara penanganan awal. Maksudnya terdapa berbagai usaha-usaha yang dilakukan sebelum terjadi kekerasan terhadap perempuan. Bukan hanya alat untuk pemberantasan kejahatan, tapi juga merupakan usaha untuk menghindari timbulnya kekerasan, sama halnya lebih baik mencegah dari pada menanggulangi ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan.

Pencegahan sejak dini memang lebih memberikan manfaat ketimbang melakukan

upaya penanggulangan setelah kekerasan itu terjadi. Ketika perempuan sebagai korban kekerasan sudah berada dalam lingkungan keluarga maka, kekerasan itu akan selalu terjadi pada diri perempuan tersebut.

Bukti yang ada saat ini bagi mereka yang mengalami KDRT dan kekerasan lainnya yang berada dalam lingkungan keluarga, untuk meninggalkan dan keluar dari hubungan berkekerasan tersebut bukanlah hal yang mudah.

Mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan dimaksud adalah segala upaya atau tindakan yang akan dilakukan untuk mencegah timbulnya akibat-akibat negatif dari pelaku serta untuk perempuan sebagai korban. Untuk itu yang dicegah adalah jangan sampai pelaku kekerasan dan perempuan sebagai korban kekerasan selalu dan selalu mengalami tindakan kekerasan, sehingga berujung pada rusaknya hubungan keluarga sebagai suami dan istri ataupun hubungan-hubungan lainnya.

- **Pencegahan dan Penanggulangan Secara Represif**

Bentuk upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, lembaga pemberi layanan dan masyarakat setelah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun yang memiliki peran penting adalah pihak aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tugas-tugas represif dari aparat penegak hukum ini telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan konsekuensinya aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas represifnya diluar ketentuan undang-undang.

Dengan adanya layanan-layanan serta kelompok dukungan baik pelaku kekerasan dan korban kekerasan akan mendapatkan perlindungan dan penanganan yang bisa mengurangi dan menanggulangi kekerasan diluar ataupun dalam lingkungan keluarga.

Layanan bantuan kesehatan untuk korban bisa didapatkan disemua rumah sakit, puskesmas, dan klinik ketika korban

¹¹Pendapat Walter C. Reckles dalam bukunya Soerjono Dirdjosisworo, Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm. 138

¹²Suara Apik, *Untuk Kebebasan dan Keadilan*, Edisi Januari, 2013

ingin melakukan Visum. Dukungan psikologis berupa proses konsultasi (konseling) hukum serta pendampingan dapat mengurangi keadaan mental dan rasa takut karena trauma yang dialami oleh korban.

Penyediaan *Rumah Aman* adalah tempat penampungan sementara untuk korban kekerasan yang memang keselamatannya terancam. keberadaan rumah aman ini sangat dirahasiakan kepada orang lain bahkan keluarga dekat korban, dimaksudkan agar korban dapat merasakan keamanan dan proses pemulihan untuk korban bisa berjalan dengan baik. Korban dapat dibina dan diberikan pendidikan keterampilan yang bisa menunjang tingkat perekonomian perempuan sebagai korban.

Perempuan korban kekerasan mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Membantu dan memberikan perlindungan dan rasa nyaman setelah mengalami kekerasan, dan jelasnya tidak akan lagi terlibat dalam hubungan berkekerasan. Ini semua menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk perempuan yang mengalami kekerasan atau yang belum mengalami kekerasan dapat mengerti dan faham bahwa mereka tidak sendiri, masih banyak yang dapat dilakukan bahkan yang dapat memberikan bantuan sepenuhnya untuk mencegah dan mengurangi serta menanggulangi segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah ini.

I. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Segala bentuk kekerasan merupakan masalah yang selalu ada dan terjadi di kehidupan masyarakat yang sederhana maupun modern. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, misalnya pada faktor Intern yaitu adanya pengaruh umur manusia, jenis kelamin, pendidikan yang lemah, dan kuatnya pengaruh agama yang idanut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu pula adanya faktor Ekstern atau

keadaan lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan penyebab yang sering kali timbul adalah masalah ekonomi dan tidak memberikan penyelesaian yang baik bagi perempuan. Tidak memberikan jaminan pula ketika sudah berada dalam taraf kehidupan ekonomi yang baik, masih ada juga perempuan masih sering mengalami kekerasan seperti, perselingkuhan, penelantaran rumah tangga atau bahkan kekerasan lainnya, yang membuat perempuan berlapang dada menerima dengan berbagai pertimbangan.

- 2) Upaya pencegahan serta penanggulangan yang dilakukan untuk perempuan korban kekerasan di Kota Palu sudah terlaksana dengan jelas, akan tetapi masih jauh dari yang diharapkan. Pencegahan dan penanggulangan yang dimaksud yakni dalam bentuk Preventif yaitu suatu upaya yang seharusnya dilakukan sebelum terjadi satu kejahatan dan sebaiknya melakukan pencegahan sebagai tindakan awal agar tindak kekerasan tersebut diselesaikan sebelum terjadi. Pemberian konseling atau melalui konsultasi dari para ahli (konselor) yang dilakukan dengan pembinaan yang rutin untuk korban serta pelaku saat ini belum mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan kita harapkan bersama, ini merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum dan masyarakat atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap kasus-kasus kekerasan, khususnya perempuan setelah terjadinya satu tindak kekerasan baik dalam lingkungan keluarga atau diluar lingkungan keluarga.

B. Saran

Banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan baik yang diketahui atau yang tidak diketahui oleh masyarakat luas yang berada di Kota Palu serta akibat-akibat yang ditimbulkannya, dengan ini penulis menyarankan agar kiranya :

- 1) Pemerintah dapat membuat satu kebijakan yang dapat memberikan perlindungan serta dapat memenuhi hak-hak perempuan. Saat

perempuan diperhadapkan dengan masalah atau kekerasan dalam rumah tangga kemudian ingin mendapatkan perlindungan setelah mengalami kekerasan, seharusnya semua instrumen hukum memderikan rasa nyaman, bukan hanya menyulitkan perempuan sebagai korban, meningkatkan jaminan kesehatan untuk perempuan atau anak, biaya ringan, dan mudah dijangkau.

- 2) Lingkungan masyarakat dipandang perlu memberikan satu pemikiran yang positif, tidak hanya menganggap masalah keluarga merupakan privasi keluarga, tetapi sebaiknya memberikan perlindungan dan rasa aman yang akan mencegah terjadinya kekerasan, sehingga dapat memberikan pencegahan awal yang sangat berguna terhadap bentuk kekerasan.
- 3) Perlu dilakukan satu upaya pengawasan dalam bentuk pendampingan atau kegiatan sosialisasi serta kerjasama yang baik berhubungan dengan penerapan peraturan serta pelaksana hukum yaitu aparat penegak hukum. keselamatan dan keamanan perempuan dari tindak kekerasan dalam atau diluar lingkungan keluarga tergantung dari peraturan/kebijakan, aparat penegak hukum, masyarakat yang baik dan peka terhadap seluruh perempuan yang menjadi korban kekerasan. Semoga tindak kekerasan terhadap perempuan yang berada di Kota Palu saat ini dan seterusnya dapat berkurang, tidak semakin berkembang, dan teratasi dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama.
- 4) Ketika jumlah kejahatan dan kekerasan dalam lingkungan masyarakat bahkan dalam keluarga akan semakin bertambah, maka akan berdampak pula pada kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aturan hukum, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Untuk menghilangkan hal demikian usaha yang dilakukan dalam hal yuridis, preventif, represif maupun layanan bantuan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan mental korban-korban kekerasan.
- 5) Untuk mengembalikan mental korban yang berkaitan dengan pemberian konseling dan rumah aman, selayaknya hal tersebut dapat

diperhatikan dengan baik, pemberian konseling yang rutin, tempat dan posisi rumah aman untuk korban harus terjaga, tidak diketahui oleh orang banyak, serta memberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk pemenuhan dan pengembangan kapasitas korban.

- 6) Melalui instansi atau lembaga-lembaga yang konsen terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan, dipandang perlu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk korban dan perempuan lainnya, yang bisa memberikan pendampingan diluar pengadilan atau mediasi, dalam hal ini seorang *Paralegal*. Selain itu, pengadaan Pos-pos Bantuan Hukum untuk korban kekerasan juga sangat diharapkan, yang nantinya Paralegal itulah akan melakukan kerja mereka sebagai pendamping untuk korban, yang menjadi tindakan awal sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika ada satu tindak kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), PT Rafika Aditama, Bandung: 2001.
- Agnes Widauti. *Hukum Berkeadilan Gender*, Kompas, Jakarta: 2005.
- Anita Krisna, Dkk. *Lepas Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yayasan Pulih, Jakarta: 2009.
- Soerdjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusuma. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981.
- Wahju Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembar Negara Republik Indonesia No. 76.1981.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (PKDRT).

C. Bahan Lain

- LBH- APIK. *Komite PBB Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Jakarta: 1998.
- Bantuan Hukum Gender Struktural. *Untuk Aparat Penegak Hukum dan Advokat Demi Meningkatkan Pemahaman Tentang Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. LBH-APIK Sulawesi Tengah, Palu: 2011.
- LBH-APIK Jakarta, Federasi LBH-APIK Indonesia dan OXFAM Australia, *Hak-Hak Untuk Perempuan*, Lembar Info Seri 11. *Menyingkap "TIRAI" Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, UNDP-LEAD Dan KPKP-ST (Sulawesi Tengah), PALU: 2009.
- Jurnal Perempuan. *Politik Bergejolak Perempuan Dimana*, KPKP-ST, Edisi Ke- VII, Palu: 2004.
- , *Hukum Itu Seksis*, KPKP-ST, Edisi Ke- X, Palu: 2004.
- , *Kerja, Krisis, dan PHK: Maknanya Untuk Perempuan*, KPKP-ST, Edisi Ke- XI, Palu: 2004.

BIODATA

DELBI ADE KUSUSMA, Lahir di Buranga, 08 Desember 1990, Alamat Rumah Jalan Otista Nomor IV Palu Sul-Teng, Telepon +62....., Alamat Email delbiadekusuma@yahoo.co.id

